



LKjIP 2025

Biro Perekonomian

Sekretariat Daerah

— Provinsi Jawa Tengah —



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR	3
KATA PENGANTAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Isu-isu Strategis.....	9
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	13
1.5 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	15
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja OPD.....	18
2.2 strategi Dan Arah Kebijakan.....	20
2.3 Struktur Program Dan Kegiatan Tahun 2025.....	21
2.4 Perjanjian Kinerja	22
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	26
3.2 Realisasi anggaran	39
3.3 Inovasi	40
3.4 Penghargaan	41
BAB IV PENUTUP.....	43
4.1Kesimpulan	43
4.2 Rekomendasi.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.1 Data Pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	11
Tabel 1.3.2 Data Pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan.....	11
Tabel 2.1.1 Renstra 2024 – 2026 Setda Provinsi Jawa Tengah.....	19
Tabel 2.2.1 Renja 2025 Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah	20
Tabel 2.3.1 Renja 2025	21
Tabel 2.4.1 Perjanjian Perubahan	26
Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	27
Tabel 3.1.2 Perbandingan target dan realisasi Kinerja Tahun 2025.....	29
Tabel 3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya .	30
Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir 2026	31
Tabel 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan.....	31
Tabel 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	33
Tabel 3.1.7 Analisis program yang menunjang keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	35
Tabel 3.2.1 Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Cascading Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	7
Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	9
Gambar 2.5.1 Aplikasi Pendukung Kinerja	24
Gambar 2.5.2 Aplikasi Dari Rantau.....	25
Gambar 2.5.3 Aplikasi SIPETE	25
Gambar 3.4.1 TPID Award Provinsi dengan kinerja TPID terbaik	41
Gambar 3.4.2 Anugerah Adinata Syariah	42

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Semarang, 30 Januari 2026

Kepada Biro Perekonomian
Setda Provinsi Jawa Tengah



Agus Prasutjo, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196907261990031002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan penyelenggara manajemen Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan dibawah dan Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan dengan tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian, Pelayanan Administratif dan Pembinaan Sumber Daya ASN di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

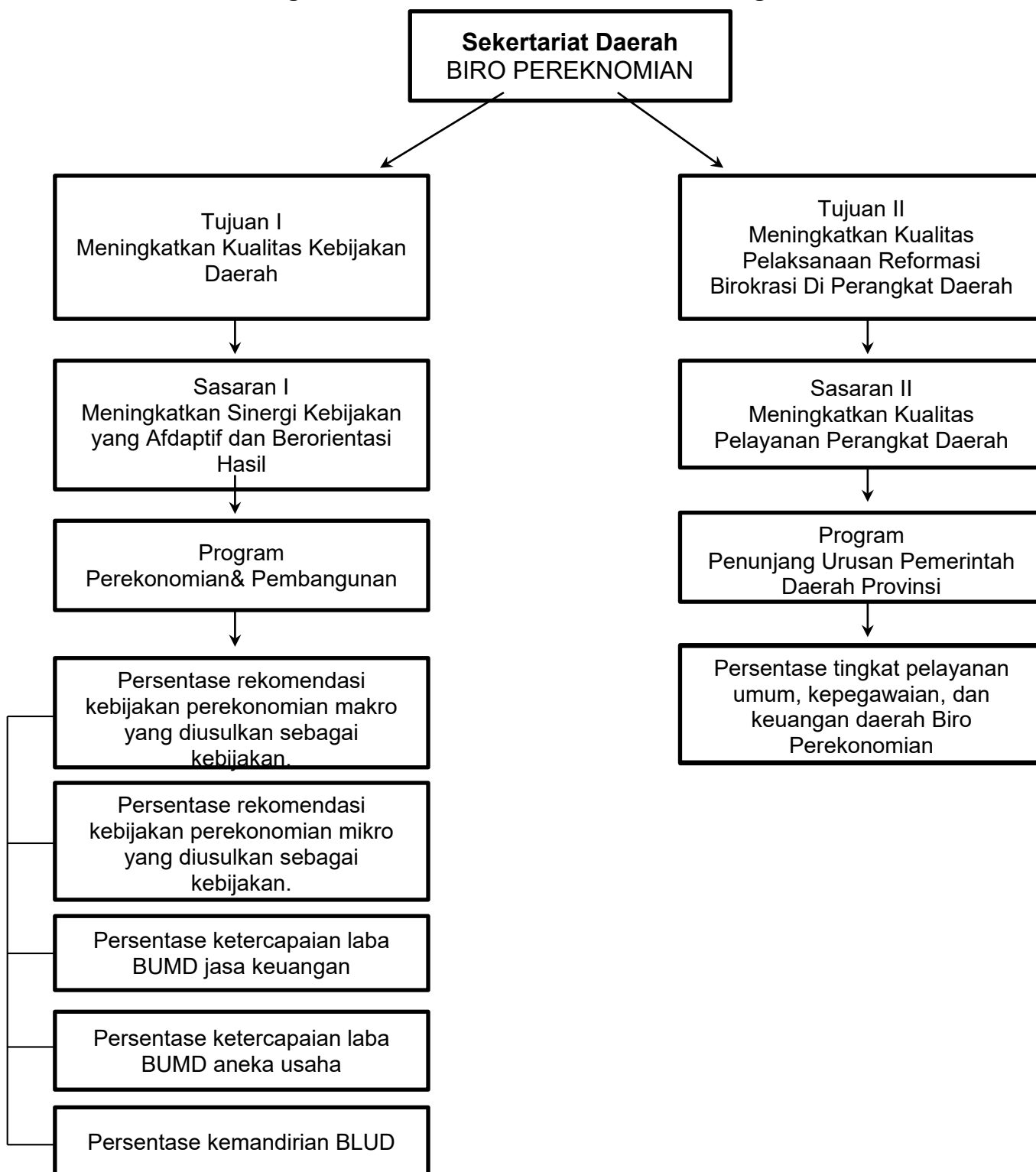
Dengan disusunnya LKjIP Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai;

2. Memberikan laporan keberhasilan dan kegagalan pencapaian saran strategis serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Sebagai bahan bagi penyempurnaan berbagai kebijakan yang akan diperlukan.

Selaras dengan paradigma Performance Based Organization (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Cascading Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai SAKIP pada Tahun 2025. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Gambar 1.1
Cascading Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Perekonomian memiliki fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Kebijakan Ekonomi Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Milik Daerah serta Kebijakan Ekonomi Sektor Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- b. Pengoordinasi pelaksanaan tugas Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah di Bidang Kebijakan Ekonomi Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Milik Daerah serta Kebijakan Ekonomi Sektor Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- c. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kebijakan Ekonomi Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Milik Daerah serta Kebijakan Ekonomi Sektor Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- d. Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Kebijakan Ekonomi Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Milik Daerah serta Kebijakan Ekonomi Sektor Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Kebijakan Ekonomi Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Milik Daerah serta Kebijakan Ekonomi Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Biro;
- b. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

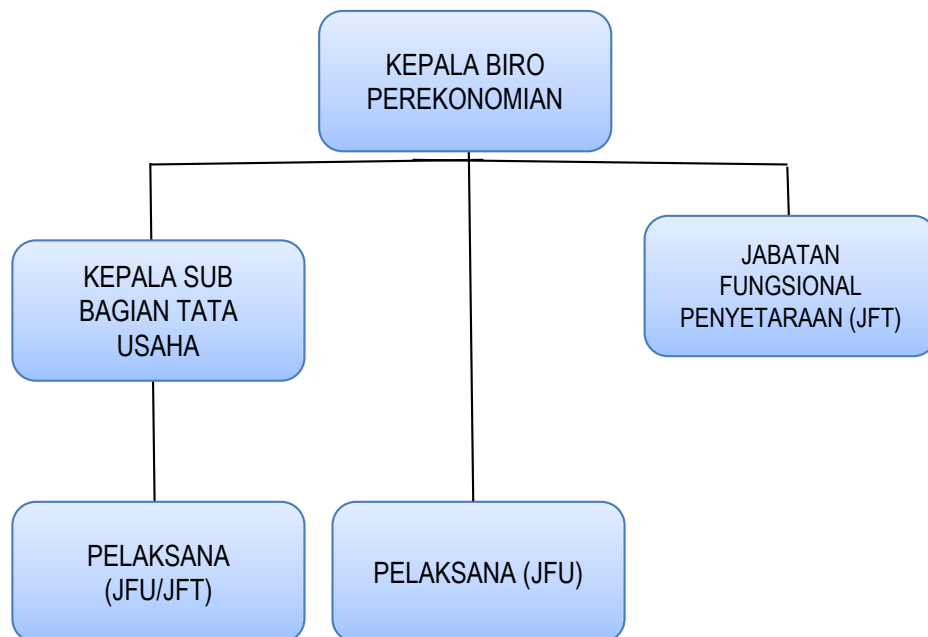
Adapun ruang lingkup fungsi teknis Biro Perekonomian terdiri atas :

- a. Kebijakan Ekonomi di Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil;
- b. Badan Usaha Milik Daerah; dan

- c. Kebijakan Ekonomi di Bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



1.2 Isu-isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pengkoordinasian penyusunan dan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibidang perekonomian pada tahun 2025, terdapat aspek – aspek strategis yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan profil risiko yang telah teridentifikasi pada Renja Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu :

1. Sinkronisasi program antar OPD (Perdagangan, Pertanian, Perhubungan, Ketahanan Pangan) belum saling berkesinambungan dari sisi hulu hingga ke sisi hilir sehingga upaya pengendalian inflasi belum dapat berjalan secara optimal sepenuhnya.

2. Belum adanya Integrasi sistem data harga dan stok pangan yang berbasis digital dan dashboard terpadu sehingga seringkali berdampak pada respon kebijakan yang lambat dan cenderung reaktif.
3. Masih tingginya ketergantungan Pemerintah daerah Kab/Kota terhadap dukungan pemerintah provinsi dalam upaya pengendalian inflasi sehingga respons kebijakan provinsi (program dan kegiatan) seringkali sektoral dikarenakan keterbatasan APBD.
4. Koordinasi program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) masih belum optimal.
5. Implementasi SAK EP mewajibkan BPR untuk mengevaluasi penurunan nilai atas seluruh instrumen keuangannya (kolektif dan Individual), penurunan tersebut mewajibkan BPR membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang fokus pada kebutuhan kecukupan pencadangan berdasarkan kredit risk.
6. Terkait dengan Single Presence Policy sesuai amanat dari UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS, dimana Pemegang Saham Pengendali yang memiliki kepemilikan saham yang sama wajib melakukan konsolidasi. Sehingga 33 PT BPR BKK (Perseroda) di Jawa Tengah akan dilakukan konsolidasi menjadi BPRS supaya ke depan seluruh segmen masyarakat dapat dilayani oleh BUMD Keuangan Konvensional dan Syariah.

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 didukung pegawai yang berstatus PNS sebanyak 36 orang dan non ASN sebanyak 2 orang. Adapun jumlah PNS posisi Desember 2025 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pegawai Biro Perekonomian dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, maka proporsi paling banyak adalah pegawai dengan pendidikan Sarjana (S-1) yaitu sebanyak 18 orang, selanjutnya adalah pegawai dengan pendidikan Pasca Sarjana (S-2) yaitu sebanyak 11 orang. Adapun pegawai dengan tingkat pendidikan D-3 sebanyak 7 orang dan paling sedikit adalah pegawai dengan pendidikan SLTA/ sederajat yaitu 2 orang. Rincian lebih lanjut mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.1
Data Pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

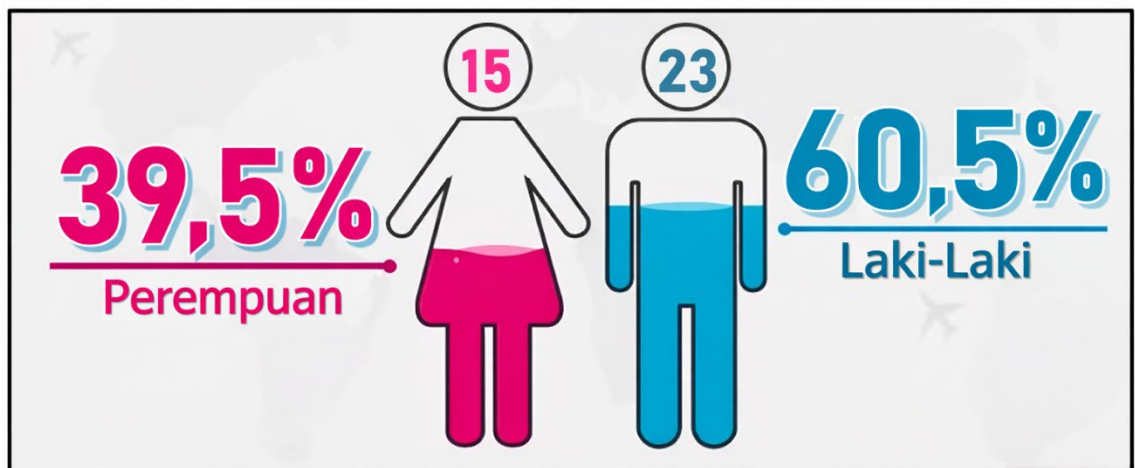
No	Jabatan	Pendidikan			
		SLTA	D3	S-1	S-2
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	1
2	Jabatan Administrasi				
	- Administrator	-	-	-	-
	- Pengawas	-	-	-	1
	- Pelaksana	2	7	16	6
3	Jabatan Fungsional	-	-	-	4
4	Non PNS	-	-	2	-
	Jumlah	2	7	18	11

- b. Jumlah pegawai khususnya PNS pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah apabila dikelompokkan menurut golongan yaitu pegawai dengan golongan terbanyak yaitu golongan III sejumlah 25 pegawai (69,44%), disusul pegawai dengan golongan II sebanyak 6 orang (16,67%) serta pegawai dengan golongan IV sebanyak 5 orang (13,89%). Rekapitulasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3.2
Data Pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	%
1	IV/b	1	2,78
2	IV/a	4	11,11
3	III/d	7	19,44
4	III/c	7	19,44
5	III/b	2	5,56
6	III/a	9	25,00
7	II/d	6	16,67
	Jumlah	36	100

- c. Selanjutnya, profil pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka proporsi paling banyak adalah pegawai berjenis kelamin laki-laki yaitu sejumlah 23 orang (60,52%) sedangkan pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 15 orang (39,47%), dengan rincian sebagaimana tabel berikut :



Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN, selain didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM), juga didukung dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai yang pengelolaan dan tanggung jawab terhadap sarana dan prasarana tersebut dikelola oleh Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2025, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan serta Program Perekonomian dan Pembangunan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.325.744.000,-.

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum mengenai Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disusun dengan menitikberatkan pada kondisi strategis organisasi. Uraian dalam bab ini mencakup peran dan fungsi organisasi, isu-isu strategis yang dihadapi, serta dukungan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran. Selain itu, pada bab ini juga disajikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menyajikan ikhtisar perencanaan kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun berjalan. Uraian difokuskan pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja sebagai komitmen kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan hasil pengukuran dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selama tahun pelaporan, yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Setiap capaian sasaran strategis dianalisis secara komprehensif melalui beberapa pendekatan, antara lain:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun pelaporan;
2. Perbandingan realisasi dan tingkat capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir;
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun pelaporan terhadap target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan dokumen RPD;
5. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan, serta peningkatan atau penurunan kinerja, berikut alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
7. Analisis program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan maupun yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian kinerja, disertai dengan rencana aksi sebagai upaya perbaikan pada setiap sasaran strategis.

B. Realisasi Anggaran

Subbab ini menguraikan realisasi anggaran yang dialokasikan dan digunakan dalam rangka mendukung

pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Selain itu, pada bab ini juga disajikan informasi mengenai inovasi serta penghargaan yang berhasil diraih oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

Bab penutup memuat simpulan umum atas pelaksanaan dan capaian kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selama tahun pelaporan. Selain itu, disampaikan pula langkah-langkah strategis dan upaya perbaikan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya sebagai bagian dari peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

Bagian lampiran memuat dokumen pendukung yang terdiri atas Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Tahun Anggaran 2025, serta dokumen lain yang relevan dan diperlukan.

1.5 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Mengimplementasikan pemberian reward and punishment sesuai dengan kriteria penghargaan pegawai/sub unit kerja yang dimiliki	Bukti Implementasi pemberian reward dan punishment sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
2	Optimalisasi evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan keselarasan capaian kinerja pada dokumen perjanjian kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dengan aplikasi e-controlling kinerja.	Keselarasan antara e-controlling, PK, dan IKI

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah merumuskan sejumlah rekomendasi perbaikan sebagai dasar peningkatan kinerja pada Tahun 2025 yang difokuskan pada penguatan sistem monitoring dan evaluasi, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah dan pihak terkait guna mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

No	Rekomendasi Tahun 2024	Langkah Perbaikan Tahun 2025
1	Mempertahankan dan mengkonsolidasikan capaian kinerja yang telah memenuhi atau melampaui target melalui penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja utama secara berkelanjutan.	Menyusun jadwal monitoring capaian indikator kinerja Tahun 2025 secara periodik, melakukan konsolidasi dan validasi data kinerja berbasis dokumen pendukung, serta melaksanakan rapat evaluasi internal sebagai forum pengendalian capaian target.
2	Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan melalui optimalisasi perencanaan anggaran berbasis kinerja agar tercapai keselarasan antara target output, outcome, dan alokasi sumber daya.	Melaksanakan telaah internal terhadap kesesuaian dokumen Renja, RKA, dan DPA sebelum penetapan anggaran, serta memastikan keterkaitan yang jelas antara sasaran, indikator, target, dan alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan Tahun 2025.

No	Rekomendasi Tahun 2024	Langkah Perbaikan Tahun 2025
3	Memperkuat sistem pengendalian internal guna memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, serta mitigasi risiko administratif dan keuangan.	Melakukan identifikasi dan pemetaan risiko kegiatan sejak tahap perencanaan, meningkatkan fungsi pengawasan melekat oleh pejabat penanggung jawab kegiatan, serta memastikan kelengkapan administrasi sebelum proses pencairan anggaran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.
4	Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah serta pihak terkait dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas kinerja.	Menyelenggarakan forum koordinasi lintas perangkat daerah secara berkala, menetapkan penanggung jawab komunikasi pada setiap program strategis, serta mendokumentasikan hasil koordinasi dan tindak lanjutnya sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas kinerja.
5	Melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik dan berbasis data sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.	Melakukan analisis atas realisasi kinerja dan anggaran secara semesteran Tahun 2025, menyusun laporan evaluasi internal sebagai bahan pengambilan keputusan, serta menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar penyempurnaan perencanaan pada periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN, SASARAN dan INDIKATOR KINERJA OPD

Perencanaan kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 serta Renstra dan Renja Sekretariat Daerah. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian selaras dengan arah pembangunan daerah serta berkontribusi secara terukur terhadap peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah.

Dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024–2026 ditetapkan tujuan yaitu Meningkatkan kualitas kebijakan daerah, yang diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang terintegrasi, adaptif, serta mampu memberikan hasil yang nyata bagi pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran yaitu Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil. Sasaran ini menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah, keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi.

Biro Perekonomian berperan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut melalui pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, serta pengendalian program perangkat daerah lingkup perekonomian. Tingkat keberhasilan pelaksanaan peran tersebut diukur melalui indikator Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian.

Rincian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2024–2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.1
Renstra 2024 – 2026
Setda Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah		Indeks Kematangan Kebijakan	36,10	37,10	38,10
		Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	90%	90%	90%
			Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	90%	90%	90%
			Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	80%	80%	80%
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah		Indeks reformasi birokrasi Sekretariat Daerah	76	76,5	77
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82,5	83
		Meningkatnya manajemen risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3	3	3

Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024–2026 tersebut menjadi pedoman dalam penetapan target kinerja tahunan. Target kinerja Tahun 2025 merupakan penjabaran operasional dari sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya dituangkan dalam Renja 2025.

Target kinerja Tahun 2025 inilah yang menjadi dasar pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Biro Perekonomian. Rincian target kinerja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1

Renja 2025

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SAT U-AN	TARG ET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kualitas Kebijakan Daerah	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%	82
					Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%	86
					Persentase nilai kemandirian BLUD	%	56
					Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	84
					Persentase rekomendasi	%	79

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8
					kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan		
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100
		Meningkatnya manajemen risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko				

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan tahun anggaran 2025 di Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Renja 2025

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	%	100

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
	Daerah Provinsi				
2	Program Perekonomian Pembangunan	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian pengembangan BUMD Aneka Usaha	Dokumen	2
			Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian pengembangan BUMD Aneka Usaha	Dokumen	2
			Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	Dokumen	2
		Pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	Dokumen	4
			Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	4
			Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	Dokumen	4
			Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan	Dokumen	4

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Didalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Perubahan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian Makro	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	84
2	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian Makro	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	79
3	Meningkatnya capaian Kinerja BUMD jasa keuangan	Persentase ketercapaian laba BUMD Jasa Keuangan	86
4	Meningkatnya capaian kinerja BLUD	Persentase nilai kemandirian BLUD	56
5	Meningkatnya capaian kinerja BUMD Jasa Produksi	Persentase ketercapaian laba BUMD Aneka Usaha	82
6	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	100

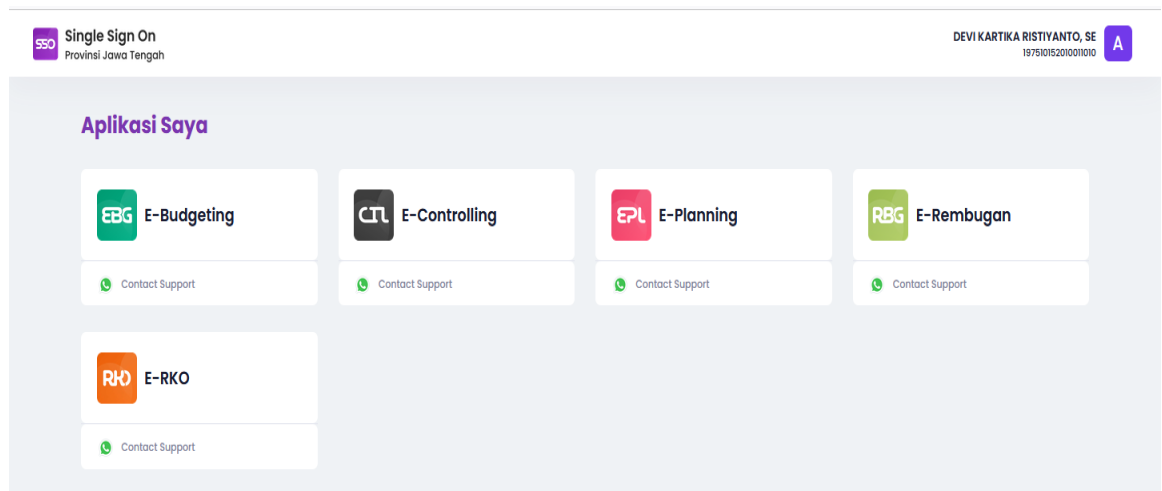
	Program	Anggaran
1.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 1.980.000.000,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 421.074.000,-

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam hal pencapaian kinerja lingkup Provinsi Jawa Tengah, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan dan menggunakan

aplikasi dari GRMS sebagai instrumen pendukung. Aplikasi terkait perencanaan sampai pelaporan digunakan untuk mempermudah monitoring realisasi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Aplikasi tersebut dapat diakses secara online melalui *Single Sign On* Provinsi Jawa Tengah (sso.jatengprov.go.id). Berikut gambar yang menunjukkan aplikasi pendukung kinerja :

Gambar 2.5.1
Aplikasi Pendukung Kinerja



Keterangan : gambar tersebut merupakan aplikasi perencanaan sampai dengan monitoring.

Selain menggunakan aplikasi dari GRMS, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah memiliki inovasi berupa aplikasi yang dibangun dan dikembangkan untuk mendukung tercapainya target kinerja. Aplikasi tersebut diantaranya :

1. DARI RANTAU

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang diperuntukkan untuk mempercepat pelaporan posko terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru sehingga mempermudah pimpinan dalam memonitoring pelaksanaan posko terpadu di Jawa Tengah. Disamping itu, agar mempermudah pimpinan untuk melakukan Langkah-langkah percepatan yang harus segera diambil apabila ada kejadian menonjol pada saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

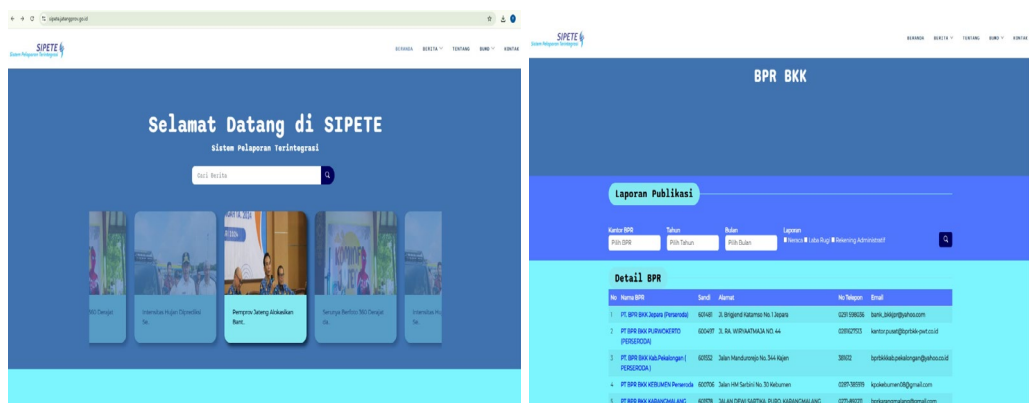
Gambar 2.5.2
Aplikasi Dari Rantau



2. SIPETE (Sistem Pelaporan Terintegrasi)

Merupakan aplikasi yang dibuat oleh Biro Perekonomian bekerjasama dengan vendor (PT MSO), yang digunakan untuk membantu Pemegang Saham (Pemprov dan Pemkab/Kota) dalam memonitoring kinerja BPR BKK se Jawa Tengah. Untuk saat ini, aplikasi tersebut masih dalam tahap pengembangan, dan akan dilakukan sosialisasi ke BPR BKK se Jawa Tengah dan Pemkab/Kota se Jawa Tengah. Sehingga diharapkan Pemegang Saham ataupun stakeholder dapat memantau perkembangan BPR BKK se Jawa Tengah secara *real time*.

Gambar 2.5.3
Aplikasi SIPETE



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan komitmen perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan secara transparan, baik dari sisi keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi, dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026. Komitmen tersebut diwujudkan melalui mekanisme pengukuran kinerja yang digunakan sebagai alat evaluasi atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja disusun berdasarkan penilaian yang terstruktur dan sistematis dengan menggunakan indikator kinerja yang mencakup aspek masukan, keluaran, dan hasil. Indikator tersebut menggambarkan proses pengelolaan sumber daya hingga menghasilkan output yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Dengan demikian, penilaian kinerja merupakan rangkaian proses yang saling terkait antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Sampai dengan akhir Tahun 2025, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai capaian kinerja sasaran, digunakan interval atau skala nilai sebagai dasar interpretasi hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

NO	KATEGORI	SKOR (%)
1	Sangat Tinggi	>91
2	Tinggi	76 – 90,99
3	Sedang	66 – 75,99
4	Rendah	51 – 65,99
5	Sangat Rendah	< 50,99

Sesuai RPD Tahun 2024 - 2026, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, memiliki tujuan "Meningkatkan kualitas kebijakan daerah". Untuk mencapai tujuan tersebut, Biro Perekonomian selaku bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yaitu "Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil."

Sampai dengan akhir Tahun 2025, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya. Capaian atas tujuan tersebut tercermin dalam realisasi sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025 berikut:

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	84	84	100	83

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	79	79	100	87
		Persentase ketercapaian laba BUMD Jasa Keuangan	%	86	86	100	57
		Persentase nilai kemandirian BLUD	%	56	56	100	85
		Persentase ketercapaian laba BUMD Aneka Usaha	%	82	82	100	80
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	100	100	100

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dalam aplikasi *e-controlling* yang secara periodik telah melaporkan hasil capaian kinerja setiap bulan dalam 1 (satu) tahun. Biro Perekonomian mempunyai 2 (dua) program dan 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Perbandingan target dan realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Program/Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi						
1	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	100	100	100	Sangat Tinggi	Biro Perekonomian
B. Program Perekonomian Pembangunan						
1	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	84	84	100	Sangat Tinggi	Biro Perekonomian
2	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	79	79	100	Sangat Tinggi	Biro Perekonomian
3	Persentase ketercapaian laba BUMD Jasa Keuangan	86	86	100	Sangat Tinggi	Biro Perekonomian
4	Persentase nilai kemandirian BLUD	56	56	100	Sangat Tinggi	Biro Perekonomian
5	Persentase ketercapaian laba BUMD Aneka Usaha	82	82	100	Sangat Tinggi	Biro Perekonomian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja pada Biro Perekonomian realisasi capaian dikategorikan Sangat Tinggi yang dikarenakan seluruh realisasi sesuai target yang ditetapkan.

Tabel 3.1.3
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

No	Program/ Indikator Kinerja	2023 (%)			2024 (%)			2025 (%)		
		T a r g e t	Rea lisa si	Cap aia n	Tar get	Realis asi	Capai an	Tar get	Realis asi	Capaia n
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi										
1	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Perekonomian Pembangunan										
1	Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	85	87	102,35	81	100,68	124,29	82	82	100
2	Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	80	83,33	104,16	85	89,88	105,74	86	86	100
3	Persentase nilai kemandirian BLUD	55	55	100	55	71,78	130,51	56	56	100
4	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	82	86	104,88	83	83	100	84	84	100
5	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	77	77	100	78	78	100	79	79	100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Kinerja Biro Perekonomian pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dapat tercapai sesuai target.

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2025 (%)	Target Akhir 2026 (RPD) (%)	Tingkat Kemajuan (%)
	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	82	83	98,80
		Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	86	87	98,85
		Persentase nilai kemandirian BLUD	56	57	98,25
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	84	85	98,82
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	79	80	98,75
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja Biro Perekonomian Tahun 2025 terhadap Target Akhir RPJMD diproyeksikan akan tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kemajuan yang rata-rata hampir tercapai

Tabel 3.1.5
Analisis Penyebab Keberhasilan

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi (%)	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang Dilakukan
1	Program Penunjang	Persentase tingkat pelayanan umum,	100	100	100	Pelayanan umum, kepegawaian, dan	-

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi (%)	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang Dilakukan
	Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian				keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian dapat dilaksanakan dengan tepat waktu.	
2.	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	84	84	100	Dokumen kebijakan telah disusun tepat waktu	-
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	79	79	100	Dokumen kebijakan telah disusun tepat waktu	-
		Persentase ketercapaian laba BUMD Jasa Keuangan	86	86	100	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BUMD jasa keuangan secara rutin.	-
		Persentase nilai kemandirian BLUD	56	56	100	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap BLUD secara rutin.	-
		Persentase ketercapaian laba BUMD Aneka Usaha	82	82	100	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BUMD aneka usaha secara rutin.	-

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan kinerja masing - masing indikator pada Biro Perekonomian Tahun 2025 didukung oleh terlaksananya kegiatan pada tiap - tiap indikator kinerja antara rekomendasi kebijakan perekonomian makro dan mikro yang diusulkan sebagai kebijakan, tingkat laba BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha serta Nilai kemandirian BLUD.

Tabel 3.1.6
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Program/ Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi								
1	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	100	100	100	162.384.000	162.190.021	99,88	0,12
Program Perekonomian dan Pembangunan								
1	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	84	84	100	300.770.000	298.748.134	99,33	0,67
2	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	79	79	100	895.766.000	797.490.252	89,03	10,97
3	Persentase ketercapain laba BUMD Jasa Keuangan	86	86	100	678.682.000	676.033.395	99,61	0,39
4	Persentase nilai kemandirian BLUD	56	56	100	35.950.000	35.514.400	98,79	1,21
5	Persentase ketercapaian laba BUMD Aneka Usaha	82	82	100	252.192.000	251.136.200	99,58	0,42

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran atas pencapaian 5 (lima) indikator kinerja pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.221.112.402,- (95,50%)

Tabel 3.1.7
Analisis program yang menunjang keberhasilan
Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	100	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	100	Menunjang
2	Program Perekonomian dan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	100	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	100	Menunjang
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	100		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	100	Menunjang
					Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	100	Menunjang
					Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	100	Menunjang
		Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	100	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha	100	Menunjang
		Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	100		Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	100	Menunjang
					Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	100	Menunjang
		Persentase nilai	100		Jumlah Dokumen rekomendasi	100	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak
		kemandirian BLUD			kebijakan hasil evaluasi BLUD		
					Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	100	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, capaian Indikator kinerja didukung oleh 2 (dua) program dengan 6 (enam) indikator kinerja program. Adapun 6 (enam) indikator kinerja program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan aktivitas kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja program yang didukung oleh kegiatan pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian, yang kemudian lebih spesifik didukung oleh pelaksanaan pada level sub kegiatan yaitu indikator kinerja program jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang perhubungan, jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi makro, jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi mikro, jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan. Aktivitas yang telah mendukung tercapainya indikator tersebut antara lain:

1) Langkah konkret dalam pengendalian inflasi daerah

Langkah-langkah yang dilaksanakan Biro Perekonomian sebagai upaya untuk mengendalikan tingkat inflasi dan stabilitas harga yang selanjutnya menjadi sebuah kebijakan dari Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur yaitu himbauan kepada Bupati/Walikota untuk:

- a) Melaksanakan gerakan menanam cabai dan bawang didukung dengan kegiatan sosialisasi disertai bantuan bibit dan saprodi kepada Masyarakat dengan melibatkan pihak terkait;
- b) Membentuk BUMD pangan dalam rangka mendukung penguatan hilirisasi pangan daerah;

- c) Melibatkan peran Bulog, BUMD dan swasta dalam Upaya pengendalian inflasi melalui operasi pasar (OP), dan/atau pendirian pasar referensi harga pada pasar pantauan dengan pemanfaatan dana CSR;
 - d) Tetap konsisten dalam melaksanakan strategi 4K ((mengupayakan keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi dan meningkatkan komunikasi yang efektif);
 - e) Melakukan pemantauan pasar/sidak pasar bersama satgas pangan Kabupaten/Kota;
 - f) Melakukan Gerakan Pangan Murah GPM.
- 2) Sinergi Stakeholder Untuk Mendorong Sektor Transportasi Yang Efisien Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Perekonomian Jawa Tengah, merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
- a) Melakukan integrasi layanan transportasi antar moda melalui pengembangan sistem konektivitas fisik dan digital, termasuk penyediaan angkutan lanjutan (feeder) pada koridor Trans Jateng dan simpul transportasi utama menuju destinasi wisata dan desa wisata. Pemerintah Kabupaten/Kota didorong untuk mendukung penyediaan halte, peningkatan kualitas infrastruktur jalan menuju objek wisata, serta optimalisasi titik pemberhentian angkutan umum guna meningkatkan load factor, efisiensi perjalanan, dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
 - b) Mendorong kolaborasi antara Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Bappeda, Pemerintah Kabupaten/Kota, operator transportasi, dan pelaku usaha dalam penyusunan paket wisata terintegrasi berbasis kawasan aglomerasi dan desa wisata. Melakukan fasilitasi integrasi layanan transportasi dengan sistem pemasaran digital dan online travel agent, serta percepatan sosialisasi dan implementasi Pergub Jateng Nomor 40 Tahun 2023

tentang Pariwisata Ramah Muslim kepada operator transportasi dan travel agent untuk memperluas segmentasi pasar wisata.

- c) Memperkuat manajemen keselamatan transportasi melalui pengawasan terpadu pada periode mobilitas tinggi (Lebaran dan Nataru), optimalisasi sistem monitoring arus lalu lintas berbasis data, serta peningkatan koordinasi dengan Kepolisian dan instansi terkait dalam penanganan kecelakaan. Menjaga ketahanan energi sektor transportasi melalui koordinasi intensif dengan penyedia BBM, LPG, dan listrik, serta meningkatkan responsivitas terhadap aduan masyarakat terkait infrastruktur dan layanan transportasi guna menjamin pelayanan yang aman, andal, dan berkelanjutan.
- 3) Pengembangan investasi Jawa Tengah khususnya Borobudur sebagai icon wisata di Jawa Tengah, merekomendasikan hal-hal diantaranya :
- a) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun roadmap investasi sektoral yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang, pengembangan kawasan strategis pariwisata, serta konektivitas transportasi, dengan menetapkan proyek prioritas yang siap ditawarkan (ready to offer project) kepada investor beserta skema pembiayaan yang jelas dan terukur.
 - b) Optimalisasi Borobudur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui pengembangan kawasan penyangga (Magelang, Purworejo, Wonosobo, Temanggung dan sekitarnya) berbasis konektivitas transportasi, penguatan desa wisata, ekonomi kreatif, serta penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung guna menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi wilayah sekitar.
 - c) Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, pemberian kepastian regulasi dan tata ruang, fasilitasi kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal, serta

penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menjaga nilai budaya, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

- b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, diantara melaksanakan aktivitas-aktivitas :
- 1) Melakukan percepatan perbaikan kinerja BUMD;
 - 2) Monitoring dan Evaluasi kinerja BUMD dan BLUD secara intensif;
 - 3) Melaksanakan Koordinasi terhadap BUMD guna mencapai target laba dan dividen;
 - 4) Melaksanakan Percepatan Penyelesaian BUMD yang bermasalah;
 - 5) Melakukan tagging kegiatan prioritas untuk meningkatkan kinerja dari BUMD.
 - 6) Mendorong sinergitas antara sesama BUMD dan BUMD dengan OPD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD Bidang Keuangan.

3.2 Realisasi anggaran

Perkembangan pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah berikut ini:

- 1) Pencapaian indikator kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah menggunakan anggaran sebesar Rp 162.190.021,- dari alokasi anggaran senilai Rp.162.384.000,- realisasi anggaran sebesar 99,88%. Sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,12% atau sebesar Rp.193.979,-
- 2) Pencapaian indikator kinerja kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian menggunakan anggaran senilai Rp. 1.096.238.386,- dari alokasi anggaran Rp.1.196.536.000,- realisasi anggaran 91,62% Sehingga terdapat efisiensi sebesar 8,38 % atau sebesar Rp.100.297.614,-.
- 3) Pencapaian indikator kinerja kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD dengan anggaran senilai Rp. 962.683.995,- dari alokasi

anggaran senilai Rp. 966.824.000,- realisasi anggaran 99,57% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,43% atau sebesar Rp. 4.140.005,-

4) Efisiensi anggaran sebesar 4,50% atau senilai Rp. 104.631.598,-.

Pencapaian indikator kinerja menggunakan anggaran sebesar Rp. 2.221.112.402,- atau 95,50 % dari total pagu Rp. 2.325.744.000,-. Sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar (4,50)% atau sebesar Rp. 104.631.598,-. Efisiensi ini terdiri dari efisiensi seperti alat tulis kantor yang dikarenakan adanya negosiasi, honor narasumber yang seharusnya eselon 2 yang hadir menjadi eselon 3, efisiensi makan dan minum rapat dan sisa anggaran perjalanan dinas.

Tabel 3.2.1
Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	162.384.000	162.190.021	99,88
2	Program Perekonomian Pembangunan	2.163.360.000	2.058.922.381	95,17
	Jumlah	2.325.744.000	2.221.112.402	95,50

3.3 Inovasi

Pada tahun 2025, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan BUMD melakukan replikasi simanis mart (kios pengendali inflasi) di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Outcome kegiatan tersebut yaitu memotong rantai pasok distribusi dari produsen ke konsumen. Manfaat dari kegiatan ini yaitu inflasi terjaga dalam rentang kendali 2,5 +/- 1. Dampak kegiatan tersebut yaitu menjaga stabilitas harga dan daya beli di masyarakat. Permasalahan adanya fluktuasi harga komoditas pangan strategis penyebab inflasi. Upaya yang dilakukan adalah penguatan sinergi dan koordinasi antar

40

stakeholders terkait. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi DPRD yaitu Meningkatkan kapasitas TPID.

3.4 Penghargaan

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan, diantaranya:

- a. TPID Award dengan kategori Provinsi dengan kinerja TPID terbaik Tahun 2025 se-Jawa – Bali yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto.

Gambar 3.4.1

TPID Award Provinsi dengan kinerja TPID terbaik



- b. Anugerah Adinata Syariah merupakan penghargaan kepada Provinsi yang memiliki kapabilitas dalam memimpin, mengembangkan, serta menggerakkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil memenangkan Penghargaan Adinata Syariah 2025 dengan kategori:

- Juara 1 Kategori Zona KHAS (Kuliner Halal Aman dan Sehat)
- Juara 3 Kategori Keuangan Mikro Syariah



Gambar 3.4.2
Anugerah Adinata Syariah

Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana Biro Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah berhasil mengkoordinasikan instansi terkait baik internal maupun eksternal dalam rangka perolehan penghargaan tersebut. Biro Perekonomian selaku Sekretaris TPID dan Sekretaris KDEKS akan senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi untuk bersama-sama dengan instansi terkait dalam rangka pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang lebih baik lagi.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Perindustrian ,Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Badan Usaha Milik Daerah serta Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata dan berfungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan pada masyarakat.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian indikator kinerja sasaran tahun sebelumnya, maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Perekonomian dikategorikan pencapaian kinerjanya Sangat Tinggi sebagaimana hasil olah data.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian seluruh indikator kinerja program Biro Perekonomian sebesar 100 %. Sedangkan realisasi anggaran sebesar 95,50%. Sehingga secara keseluruhan hasil capaian indikator maupun realisasi anggaran termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

4.2 Rekomendasi

Beberapa langkah atau strategi yang dilaksanakan dalam perbaikan kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah untuk kedepannya yaitu:

1. Sesuai amanat dari UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS, dimana Pemegang Saham Pengendali yang memiliki kepemilikan saham yang sama wajib melakukan konsolidasi. Sehingga 33 PT BPR BKK (Perseroda) di Jawa Tengah akan dilakukan konsolidasi menjadi BPRS supaya ke depan seluruh segmen masyarakat dapat dilayani oleh BUMD Keuangan Konvensional dan Syariah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Kepala Biro Perekonomian
Setda Provinsi Jawa Tengah



Agus Prasutio, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196907261990031002